



PERAN PEMERINTAH DALAM PERDAMAIAN DAN MANAJEMEN KONFLIK: STUDI KASUS KONFLIK THAILAND SELATAN

Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han

Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan

Timur

Dip923@umkt.ac.id

Abstrak

Di dalam sebuah tatanan kenegaraan, Pemerintah merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan guna mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara. Demikian pula jika terjadi sebuah konflik yang dapat mengancam keamanan negara, maka pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam proses manajemen konflik agar tidak tereskalasi sehingga mampu menciptakan kondusifitas agar tercapai sebuah perdamaian. Demikian halnya dengan pemerintah Thailand, yang mana memiliki peranan cukup besar dalam proses manajemen konflik di Thailand Selatan yang hingga sampai saat ini masih terus bergejolak. Melalui tulisan ini, akan dijelaskan mengenai apa saja dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam proses resolusi konflik guna menciptakan perdamaian di wilayah Thailand Selatan.

Kata kunci: Manajemen Konflik, Pemerintah, Thailand Selatan

Pendahuluan

Pascaperang dingin, dinamika keamanan cenderung beragam. Negara-negara harus bersiap dalam menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Dalam konteks global seperti saat ini, ancaman keamanan hadir dalam berbagai macam wujud. Adapun wujud dari ancaman tersebut antara lain berupa ancaman ekonomi, lingkungan, stabilitas politik dalam negeri, pemberontakan, peredaran narkoba, penyakit, dan ancaman non-senjata lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Samuel P. Huntington bahwa di masa yang akan datang ancaman akan lebih banyak berasal dari internal negara ketimbang dari luar negara dimana masalah identitas dan kebudayaan menjadi unsur utama terjadinya perselisihan (Huntington, 1996).

Tesis Huntington tersebut pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan dimana saat ini banyak negara tengah mengalami konflik Internal dengan latar belakang perbedaan etnis dan kebudayaan yang salah satu diantaranya ialah

Thailand. Hingga sampai saat ini, Thailand masih harus dihadapkan dengan masalah separatisme yang terjadi di wilayah Thailand Selatan. Konflik tersebut merupakan salah satu isu separatisme paling serius yang pernah terjadi di Asia Tenggara dimana hampir 6000 orang terbunuh akibat pergolakan di tahun 2004 (Supalak; Don Pathan, 2004).

Pada umumnya, separatisme muncul disebabkan karena beberapa alasan diantaranya ialah perbedaan ideologi, kekecawaan, provokasi, dan penolakan (*rejection*). Bagi Etnis Malay-Muslim di Thailand Selatan, mereka harus menghadapi ancaman *Ethnonational* sebagai bentuk implementasi dari kebijakan asimilasi pemerintah pusat Thailand yang mendahulukan homogenitas budaya nasional didasarkan pada kesatuan negara-bangsa yang dijalankan bersamaan dengan tiga pilar kebangsaan yakni *Nation (Thai)*, *Monarchy*, dan *Religion*.

Konflik di Thailand Selatan merupakan konflik Horizontal yang melibatkan Negara dan beberapa kelompok elemen masyarakat Malay-Muslim yang tersebar di beberapa Provinsi di wilayah Thailand Selatan. Oleh karenanya, sebagai pihak yang berwenang dalam proses pengambilan kebijakan ditingkat nasional, pemerintah Thailand memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara dari berbagai macam bentuk ancaman. Konflik separatisme merupakan salah satu hal yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya sebuah upaya nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dengan demikian, melalui tulisan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam manajemen konflik di Thailand Selatan. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai fenomena yang ada dengan pendekatan resolusi konflik sebagai dasar analisis isu.

Kerangka Teoritik

Konflik dipahami sebagai pertentangan antara sejumlah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan (*incompatibility of goals*). Perbedaan kepentingan, oleh Parsons (1951) dan Dahrendorf (1959) ditasbihkan sebagai katalisator utama lahirnya konflik. Secara umum, sengketa antara masyarakat bermula dari mandegnya dialog dan tak bertemunya kepentingan masing-masing pihak. Setiap kepentingan yang tak dipertemukan rentan tereskalasi menjadi kekerasan dan merenggut korban jiwa.

Upaya penyelesaian konflik di era postmodern relatif beragam. Lund (1996) menciptakan skema diplomasi preventif untuk meredakan sengketa antarnegara usai perang dingin walaupun masih memasukkan pendekatan militer di dalam skema termaksud. Sementara itu, Lederach (1997) menekankan rekonsiliasi sebagai satu-satunya metode resolusi konflik. Beriker (2009) merangkum pandangan sejumlah pakar sosiologi dan diplomasi untuk menjelaskan kerangka serta pola resolusi konflik yang dapat diterapkan dalam setiap sengketa seperti mediasi, resolusi konflik bertema dialog interaktif, rehabilitasi pascakonflik, program kerja sama bilateral, *rewards and praising*, ancaman, sanksi serta invasi militer. Upaya resolusi konflik yang dianjurkan ini merupakan produk pengamatan empiris serta telah mempertimbangkan berbagai variabel, baik secara struktural maupun prosedural, baik secara strategis maupun relasional.

Resolusi konflik merupakan sebuah konsep dasar bagi terwujudnya perdamaian abadi (positive peace). Di dalamnya, pihak-pihak yang bersengketa secara sadar ingin mengakhiri permusuhan serta mengupayakan perdamaian secara terus menerus. Melalui negosiasi atau mediasi, kedua belah pihak sepakat mengurangi ketegangan dan merintis langkah konstruktif untuk mengakhiri konflik. Dalam sejumlah kondisi, konflik dipahami sebagai sarana pembaharuan karena dalam proses konflik, baik individu maupun masyarakat mereformulasi nilai-nilai serta norma-norma yang dianggap tak lagi relevan dengan situasi terkini kelompoknya. Dalam proses purifikasi sistem sosial, guncangan berupa pertikaian terbuka berpotensi terjadi sehingga upaya resolusi konflik mesti berangkat dari pertimbangan kritis tentang situasi masyarakat serta mampu memetakan akar konflik dengan jeli.

Pada dasarnya, konflik tak selalu buruk. Simmel dan Coser (via Deutsch, 1973) menjelaskan bahwa konflik dapat mencegah kemandegan peradaban, menstimulasi kepentingan dan rasa ingin tahu, serta menciptakan kelompok baru beserta identitas personal setiap individu di dalamnya. Pandangan ini menjelaskan bahwa konflik sebagai fenomena paradoksial harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang niscaya terjadi sehingga dalam memikirkan upaya penyelesaian, pemahaman mengenai karakteristik konflik sangat dibutuhkan. Coser (1956) menjelaskan bahwa konflik berpotensi menstabilkan serta mengintegrasikan setiap fungsi relasi sosial. Melalui pendekatan yang tepat, sistem sosial akan diadaptasi dengan cara mengeliminasi setiap sumber ketidakpuasan. Dengan menghilangkan seluruh sumber konflik, konflik dapat ditransformasikan menjadi perdamaian. Resolusi konflik yang tampil dalam beberapa bentuk seperti rekonsiliasi, negosiasi, mediasi serta litigasi memiliki tujuan yang sama. Dalam penerapannya, setiap metode memiliki pengkhususannya masing-masing. Melalui upaya-upaya solutif inilah konflik dapat diredakan.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Thailand Selatan

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Thailand Selatan tersebar di tiga provinsi yakni Pattani, Yala dan Narathiwat. Pada Januari 2004, beberapa orang bersenjata lengkap menyerang markas Tentara Nasional Thailand di Provinsi Narathiwat dan membunuh 4 tentara. Konflik dengan cepat menjalar ke Provinsi Yala dan Pattani dimana beberapa petugas kepolisian tewas. Menyikapi hal itu Perdana Menteri Thaksin Shinawatra memberlakukan darurat perang di beberapa distrik di Pattani, Yala dan Narathiwat.

Peristiwa di atas merupakan salah satu dari beberapa episode menegangkan yang terjadi di wilayah yang dahulunya merupakan daerah Kesultanan Pattani itu. Konflik berkepanjangan yang terjadi di tiga provinsi ini menambah daftar panjang konflik etnis-agama di wilayah perbatasan sejumlah negara di Asia Tenggara. Secara historis, konflik berawal dari penandatanganan *Anglo-Siamese Treaty* pada 1909 yang memasukkan wilayah bekas Kesultanan Pattani ke dalam wilayah pendudukan Siam. Melvin (2007) menjelaskan bahwa penggulingan kekuasaan Sultan Pattani serta pemaksaan penggunaan Bahasa Thai dan perintah menjalankan spiritualitas Buddhisme kepada penduduk Pattani yang beretnis Melayu dan beragam Islam adalah penyebab utama konflik di awal abad

ke-20 itu. Kebijakan asimilasi yang dianggap ekstrim oleh masyarakat Pattani menghasilkan sejumlah bentrokan di kawasan itu. Di era Perdana Menteri Plaek Phibulsongkhram (1938-1944; 1948-1957), kebijakan asimilasi semakin diintensifkan yang berbuntut pada penguatan resistensi masyarakat Melayu Muslim di wilayah itu. Di awal tahun 1947, *Pattani People's Movement* lahir yang disusul oleh berdirinya *Gabungan Melayu Patani Raya/GAMPAR* pada medio 1950an, *Barisan Revolusi Nasional/BRN* pada 1963, *Pattani United Liberation Organisation/PULO* pada 1968, dan *Barisan Bersatu Mujahiddin Pattani/BBMP* pada 1985. Melvin (2007) mengemukakan bahwa salah satu katalisator lahirnya insurjensi di Thailand Selatan adalah keteringgalan sosial ekonomi. Provinsi-provinsi di Selatan Thailand secara umum jauh tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, asimilasi kebudayaan Thai-Buddhisme dan Melayu-Islam yang tak seimbang menimbulkan kesan akan adanya kolonialisme kultural dan terjadinya dekonstruksi identitas Melayu dan Islam.

Permasalahan kompleks yang terjadi di Thailand Selatan sejatinya berkisar pada upaya pemerolehan pengakuan dari pemerintah Thailand terhadap eksistensi kelompok Melayu Islam di Thailand yang sebagian besar beretnis Thai dan beragama Buddha. McCargo (2010) menjelaskan bahwa kekerasan yang menyita perhatian publik dunia ini seharusnya dipandang dalam bingkai pemenuhan kebutuhan dasarnya serta pemberian perhatian bagi pilihan-pilihan rasional yang hendak ditetapkan seperti pemberian otonomi atau kemerdekaan, walau pilihan yang terakhir ini tampaknya mustahil.

Gerakan masyarakat di Thailand Selatan sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan revivialisme Islam internasional seperti revolusi Iran dan konflik Afganistan yang merepresentasikan solidaritas umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Revolusi Islam sepanjang peradaban manusia telah mengartikulasi kebutuhan umat Islam di Patani terhadap identitas keagamaan serta *platform* ideologis yang dipilihnya, sehingga terminologi *Jihad* digunakan untuk menjelaskan perjuangan masyarakat Pattani mewujudkan harapan-harapan mereka yang senada dengan perjuangan umat Islam di belahan dunia lainnya.

Resolusi Konflik Thailand Selatan

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah Thailand agar setiap konflik yang terjadi di wilayah Thailand berakhir dengan damai. Maka dari itu prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik berpegang teguh pada penyelesaian tanpa kekerasan diberbagai tingkatan konflik, prinsip kemurahan hati, pengelolaan yang professional, mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak konflik secara adil dan menemukan kesepakatan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan mediasi dan negoisasi diantara berbagai pihak yang terlibat dan berusaha menyelesaikan konflik tersebut pada tingkatan terbawah. Pelaksanaan mediasi dan negoisasi di tingkatan terbawah ini juga mengikutsertakan sukarelawan untuk terlibat aktif dalam proses ini seperti dari organisasi swadaya masyarakat yang sebelumnya juga diberikan pelatihan untuk menemukan alternative penyelesaian konflik dan tentu penyelesaian konflik tersebut utamanya dilakukan oleh kepala distrik wilayah melalui peningkatan keamanan dan membangun pusat pengaduan

terkait keadilan (*Damrongtham Center*) dan juga mengumpulkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang terlibat untuk aktif dalam forum mediasi dan negosiasi.

Pemerintah Thailand juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada masyarakat yang kemudian aksi ini dibawa kedalam sebuah pertemuan antara demonstran dengan pemerintah dengan forum kondusif dan taat pada dasar-dasar hukum, memfasilitasi keamanan publik dan memberikan kenyamanan kemudian memberikan pemberitahuan tentang rencana pertemuan publik kurang dari waktu 24 jam sebagai bukti keseriusan pemerintah dan apabila terjadi pertemuan yang menyebabkan kekacauan dan melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand ini pada dasarnya adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat membidik permasalahan secara akurat dan kemudian menciptakan jalan keluar melalui kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik.

Namun dalam penyelesaian konflik yang terjadi di daerah Pattani wilayah Thailand Selatan yang didasari oleh permasalahan identitas suku dan budaya serta agama yang merambat ke berbagai aspek kehidupan lainnya seperti kesenjangan pembangunan. Pemerintah dalam konflik tersebut telah mengalokasikan dana yang besar sebagai bukti upaya pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik yang ada di Thailand Selatan. seperti pada bulan Maret tahun 2009 untuk biaya 3 tahun pembangunan dengan anggaran lebih dari \$ 2,4 Miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand. Bahkan apabila dibandingkan dengan aliran bantuan internasional yang tidak sampai 1% dari anggaran bantuan dari pemerintah Thailand untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Thailand dalam konflik ini. Burke (2013) menjelaskan bahwa upaya lain yang ditempuh pemerintah adalah dengan menciptakan kondisi yang aman, membuka ruang investasi dalam pembangunan jalan dan pelayanan publik dan memberikan dukungan finansial bagi korban kekerasan serta meningkatkan mutu pendidikan.

Keinginan pemerintah Thailand ini juga terwujud dalam berbagai kebijakan pembangunan lainnya untuk memberikan kemajuan yang positif demi integrasi negara. Berulang kali pemerintah berupaya untuk melibatkan etnis Melayu Muslim yang ada di Pattani melalui program dan kebijakan pemerintah yang telah diadaptasi dengan kebutuhan masyarakat Melayu Muslim tersebut. Seperti contoh lainnya adalah melalui kebijakan memberikan jalur khusus masuk universitas bagi masyarakat lokal bahkan memfasilitasi program NGO untuk mengadakan program pertukaran pemuda di daerah Pattani dengan pemuda di wilayah Thailand lainnya, membangun pusat komunitas, pendanaan terhadap komunitas dan meningkatkan rekrutmen masuk dalam lembaga pemerintahan bagi masyarakat Melayu Muslim.

Segala prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang digunakan oleh pemerintah Thailand khususnya dalam konflik Thailand Selatan ini adalah untuk "*winning the hearts and minds*" dari masyarakat lokal melalui kebijakan-kebijakan pemerintah demi integrasi nasional. Langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa/masalah yang terjadi di masyarakat terbagi menjadi 4 level. Mulai dari penyelesaian di level desa oleh dewan desa, level kabupaten oleh

kepala kabupaten, pusat peningkatan keadilan (Damrongtham center) dan di level yang tertinggi yaitu kongregasi umum atau pertemuan publik sesuai dengan act 2015.

Dalam rangka menangani ketidakharmonisan, kekerasan, dan memberikan kembali kebahagiaan serta kedamaian masyarakatnya, pemerintah kerajaan Thailand melalui konstitusinya dalam pasal 19, mengatur peran pemerintah dalam menciptakan keharmonisan serta upaya rekonsiliasi. Dalam hal ini, pemerintah meyakini bahwa pengorganisasian dalam semua sektor dilakukan dengan tujuan untuk dapat melakukan komunikasi secara terbuka guna penciptaan keharmonisan serta kedamaian di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Thailand itu sendiri.

Meskipun demikian mereka juga mengakui adanya ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan merupakan tantangan yang menurut mereka sulit untuk diselesaikan, diantaranya adalah narkoba, bencana alam dan juga adanya gerakan sparatis di Thailand selatan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman yang terjadi tersebut dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Penguatan institusi keamanan nasional dan pemerintahan, dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga monarki nasional di seluruh sistem pendidikan formal dan alternatif, termasuk berbagai saluran komunikasi, mengembangkan efektivitas dan kekuatan yang terkait dengan pencegahan dan menekan penyalahgunaan institusi nasional dengan menargetkan kelompok dan menggunakan penegakan hukum yang serius, menerbitkan dan melakukan pekerjaan atau proyek di bawah inisiatif kerajaan, memperkuat demokrasi dari pemerintahan dengan raja sebagai kepala negara dengan administrasi pemerintahan yang baik dari semua sektor publik.
2. Memastikan keadilan, harmoni dan rekonsiliasi nasional, dengan cara menata ulang fungsi administratif di semua tingkat karena memiliki keadilan, mengurangi disparitas dan memperbaiki sumber relokasi, membangun kepercayaan dalam proses peradilan dengan mengembangkan efisiensi, standar dan ketahanan untuk merespon kebutuhan masyarakat, mendorong untuk mengekui keragaman pemikiran, kepercayaan, identitas, bahasa, budaya dan cara hidup, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
3. Mencegah dan menyelesaikan pemberontakan di Thailand Selatan, melalui cara-cara yang memperkuat lingkungan damai, memulihkan kepercayaan rakyat terhadap penegakan keadilan, mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan melalui proses partisipatif semua sektor, mempercepat pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, mempromosikan keberlanjutan proses perdamaian untuk mencari jalan keluar dari konflik dan kekerasan melalui forum komunikasi bersama, menciptakan pemahaman tentang situasi sebenarnya kepada masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri karena mengurangi eksploitasi dari situasi yang terjadi, dan memberikan kesatuan mekanisme untuk memecahkan masalah yang terjadi.

4. Salah satu misi utama kementerian dalam negeri adalah menjaga keamanan dalam negeri dan perdamaian demi keselamatan rakyat Thailand. Oleh karenanya dalam menghadapi ancaman yang ada, pemerintah thailand melalui kementerian dalam negerinya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan kementerian dan institusi yang berkaitan dengan konsteks isu keamanan terutama dengan pemerintah daerah.

Dalam melestarikan nilai-nilai nasionalnya, pemerintah melalui kementerian dalam negeri melakukan upaya-upaya diantaranya melalui kebijakan yang fokus pada pendidikan dan pembelajaran, agama, kesenian dan budaya. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melakukan reformasi pendidikan dan sistem pembelajaran pada kedua format pendidikan alternatif dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor swasta, pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengembangan pendidikan, mendorong buddhisme dan agama-agama lain untuk memainkan peran penting dalam menumbuhkan etika, serta meningkatkan kualitas hidup, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat Thailand, melakukan konservasi, restorasi dan penyebaran warisan budaya, bahasa dan dialek dan pengetahuan lokal, termasuk berbagai seni dan budaya Thailand.

Selain itu pemerintah juga berupaya dalam menumbuhkan nilai dan hati nurani yang baik, terutama 12 nilai utama nasional dalam upaya memperkuat persatuan di thailand, seperti menjunjung tinggi 3 pilar utama yaitu bangsa, agama dan monarki. Kedua yaitu kejujuran, pengorbanan, dan kesabaran dengan sikap positif demi kepentingan masyarakat. Ketiga berbakti kepada orang tua, wali dan guru, mencari pengetahuan langsung dan tidak langsung dan pendidikan, pelestarian tradisi dan budaya Thai. Keempat peningkatan moralitas, integritas, pertimbangan, kemurahan hati, dan berbagi, memahami dan belajar cita-cita demokrasi sejati dengan keagungan-Nya raja sebagai kepala negara, menjaga disiplin, rasa hormat terhadap hukum dan orang tua, sadar akan tindakan sesuai dengan keagungan pernyataan kerajaan, menerapkan keagungan ekonomi untuk kecukupan raja, menghemat uang untuk kebutuhan waktu, bersikap moderat dengan surplus untuk berbagi atau perluasan bisnis, menjaga kekuatan fisik dan mental, pantang menyerah pada kekuatan atau keinginan jahat, merasa malu atas kesalahan dan dosa sesuai dengan prinsip agama serta menempatkan kepentingan publik dan nasional diatas kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dalam pengelolaan konflik yang terjadi pemerintah Thailand mengedepankan prinsip-prinsip seperti, pertama prinsip perdamaian dan non kekerasan, yaitu prinsip penyelesaian masalah yang dilakukan dengan jalan mediasi dan negosiasi yang memberikan hak setara terhadap semua pihak berdasarkan asas keadilan. Kedua, prinsip belas kasihan dengan mengasumsikan bahwa orang-orang yang datang ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan adalah orang yang sebenarnya korban, oleh karenanya pejabat harus memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah dengan semaksimal mungkin. Ketiga, prinsip tata pemerintahan yang baik. Jika mereka yang bermasalah tidak setuju dengan solusi dan cenderung melanggar hak yang lainnya, pihak berwenang harus menerapkan strategi non-kekerasan terlebih dahulu seperti negosiasi atau nasihat hukum agar sesuai dengan hukum. Namun, jika pelanggaran serius terus berlanjut,

maka tindakan hukum-pun akan dilakukan. Keempat, prinsip mendengarkan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendengar pendapat dari semua pihak untuk dapat ditemukan akar permasalahannya. Dan yang terakhir adalah prinsip penyelesaian sengketa berbasis wilayah. Hal ini berarti bahwa semua sengketa harus diselesaikan di wilayah terjadinya sengketa tersebut.

Daftar Sumber

- Connors, Michael Kelly. 2003. *Democracy and National Identity in Thailand*. London: Routledge & Curzon
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press.
- Leung, Kwok, Dean Tjosvold. 1998. *Conflict Management in the Asia Pacific: Assumptions and Approaches in Diverse Cultures*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) PTE Ltd
- Sandole, Dennis J.D., et al. 2009. *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Oxon: Routledge
- Huntington, Samuel P. 1996. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Burke, Adam et al. 2013. "The Contested Corners of Asia : The Case of Southern Thailand". The Asia Foundation : San Fransisco
- McCargo, Duncan. 2010. *Autonomy for Southern Thailand: Thinking the Unthinkable*. Journal Article of Pacific Affairs Vol. 83, No. 2
- Melvin, Neil J., 2007. *Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency*. Journal Article of SIPRI Policy Paper No. 20
- International Crisis Group, 2012. *Thailand: The Evolving Conflict in the South*, Asia Report No. 241
- McCargo, Duncan. 2005. *Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand*, Journal Article of Cornell University Press, (2008); International Crisis Group, *Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad*, Asia Report No. 98